



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Website : <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-2534/FSy/PP.01.2/09/2022
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan

05 September 2022

Yth. Korr OK H.
Agi Siholibi omni syukur +
Cat: jth kejiwa dan perantara

Yth. Kepala Biro AUPK
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
di tempat

16/9

Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Menindaklanjuti surat Kepala Biro AUPK Nomor: 381/Un.3/08/2022 tentang Tidak Lanjutl Hasil Diklat Teknis Bagi Tenaga Kependidikan, maka kami memberitahukan bahwa di Fakultas Syariah sudah melakukan Sharing Knowledge antar tenaga kependidikan bahkan dihadiri oleh Dekan Fakultas Syariah yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2022 di ruang pertemuan Fakultas Syariah Lt.1. Untuk melengkapi laporan tersebut kami kirimkan Naskah dan foto kegiatan sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini, atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



a.n. Dekan
Kabag. Tata Usaha,

Ahmad Zubairi
Ahmad Zubairi

Tembusan:

1. Dekan
2. Para Wakil Dekan
3. Para Ketua Prodi



What Next after Islamic Higher Educational Transformation into UIN?: Area of Concerns and Future Direction

M. Adib Abdushomad, M.Ag, M.Ed., Ph.D
Head of Sub-Directorate on Academic Development
Diktis-MORA

DASAR HUKUM

1. UU No 20 Tahun 2003 ttg Sisdiknas;
2. UU No 12 Tahun 2012 ttg Pendidikan Tinggi;
3. PP No. 46 Tahun 2019 ttg PTK;
4. PMA No. 15 Tahun 2014 ttg Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan;
5. PMA No. 42 Tahun 2016 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. KMA No. 394 Tahun 2003 ttg Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
7. PMA 20 tahun 2020 ttg Transformasi PTK yang mencabut PMA No 15 tahun 2014

Behind the Scene of the Transformation

- Dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan tinggi includes untuk membuka prodi umum.
- Menginginkan peningkatan kualitas dan kuantitas PTKIN antara lain dengan mengembangkan prodi umum dan pengembangan kelembagaannya.
- Tuntutan dan kebutuhan era global yang bisa mendegradasi peran lulusan IAIN jika hanya mengkaji ilmu-ilmu keagamaan
- Menghilangkan dikotomi ilmu sains dan agama.
- Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- Pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam berbasis Integrasi Ilmu dan Moderasi Islam (mandat institusi).

Transformational Implication

- To answer dichotomy of knowledge between religious (Islamic Studies) and Sciences
- IHE must be more professional, creative, innovative to implement open management system.
- IHE should able to produce their alumni based on the stakeholders need
- IHE will be more open to recruit human resources of non discipline of Islamic Studies
- IHE should protect their core competency of Islamic studies from "marginalization".

CORE VALUES OF IHE TRANSFORMATION

- *Intelektualisme*, secara generik sebagai preferensi kuat yang mendasari pada reason, fakta, dan logika dalam memikirkan dan memahami sesuatu yang mampu membangun peradaban unik dan tinggi dalam rangka menyumbang peradaban Islam;
- *Intelegensia*, dirumuskan sebagai kemampuan umum dalam menguasai ilmu pengetahuan serta memiliki kepedulian yang kuat kepada sesama manusia maupun alam sekitar;
- *Keterbukaan*, dirumuskan sebagai kemampuan dalam memiliki sikap terbuka dan kemampuan menerima keragaman dan perbedaan;
- *Kekinian atau kemandirian*, dirumuskan sebagai semangat perubahan dan kesesuaian dengan masa sekarang terutama dalam pengembangan peradaban saat ini;
- *Ke-Indonesiaan*, menunjuk pd teritorial, identitas, dan nasionalisme kebangsaan. PTKI diharapkan dpt berkontribusi bg negara dan bangsa Indonesia;
- *Kesalehan*, merupakan nilai diri yang berasal dari *inner quality* yang terkandung dalam *habl min Allah* dan *habl min al-nas*.

SOME CHALLENGES

- IAIN yang mengusulkan transformasi menjadi UIN belum memiliki konsep yang matang terutama dalam *core bisnis* yang akan dilakukan terutama dalam pendirian prodi-prodi umum yang menjadi prioritas utama;
- Belum memiliki jumlah dosen yang memadai dan bagaimana rencana rekrutmentnya;
- Masih ada IAIN yang hanya terjebak dalam keinginan mendapatkan perubahan status;
- Transformasi pada tahun 2017 pada 6 UIN selama kurun waktu 2 tahun masih saja kesulitan mendirikan prodi-prodi umum.

PENYEBAB TERJADI KENDALA

- Ketidakjelasan dalam pelaksanaan program-program pengembangan dan ukuran pencapaian kinerjanya;
- Sumberdaya, dan sumber pendanaan;
- Manajemen, kemampuan manajerial baik tingkat universitas maupun unit-unit kerja belum optimal dalam mewujudkan pengelolaan pendidikan yang efektif, efisien, produktif, serta akuntabel; dan
- Budaya, kultur akademik belum terbangun, sehingga terjadi ketidakselarasan antara kultur yang ada dengan strategi-strategi perubahan yang dikembangkan.

PERIODE PERTAMA (2002-2005)

- Platform pendidikan periode pertama, secara umum transformasi IAIN menjadi UIN menekankan pengembangan kajian keislaman dan keilmuan. Pendekatan integrasi keilmuan menjadi kajian utama, didukung pengembangan kajian sains dan teknologi;
- Paradigma keilmuannya berusaha mengembangkan konsep paradigma keilmuan yang mengacu pada integrasi dan interkoneksi ilmu pengetahuan dengan mengacu pada al-Quran dan hadist serta teknologi;
- Landasan Penyelenggaraan Pendidikan sangat kuat nuansa integrasi keilmuan ke dalam penyelenggaraan pendidikan dengan semangat integrasi dan interkoneksi, hampir semua UIN mencoba mengintegrasikan Pancasila dan Islam sebagai pondasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

PERIODE KEDUA (2013-2015)

- Platform pendidikan yang dikembangkan oleh UIN tidak jauh berbeda dengan tahap pertama. Yaitu menekankan pengembangan kajian keislaman dan keilmuan. Semangat integrasi keilmuan menjadi kajian utama. Perbedaannya adalah dengan menambahkan penekanan penguatan karakter Islami yang akan menjadi ciri khas UIN. Sedangkan nilai-nilai sains dicantumkan namun belum menguraikan langkah-langkah praktis bentuk integrasinya;
- Paradigma keilmuannya tetap mengacu pada konsep integrasi dan interkoneksi dan menyatukan keilmuan menjadi satu kesatuan dengan mencoba mengaitkan dengan kearifan lokal;
- Landasan Penyelenggaraan Pendidikan masih mengacu pada semangat integrasi keilmuan dan interkoneksi, hampir semua UIN mencoba mengintegrasikan Pancasila dan Islam sebagai pondasi dalam menemukan, mengembangkan, melakukan inovasi, dan menyebarkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu-ilmu keislaman, sosial-humaniora serta sains dan teknologi sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri, unggul, kompetitif dan inovatif.

DISTINGSI DAN JANJI PERIODE KEDUA

1. Mewujudkan pendidikan tinggi yang unggul;
2. Pengembangan dan pengintegrasian ilmu keislaman, sains, teknologi, dan seni;
3. Membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*);
4. Mewujudkan pendidikan tinggi yang bertaraf internasional, berwawasan kebangsaan, dan berkarakter Islami.

PERIODE KETIGA (2017)

- Platform pendidikan tetap mengacu dan menekankan pada kajian pengembangan keislaman dan keilmuan. Perbedaannya, mencoba mengkaji dan mengimplementasikan nilai-nilai sains diperkuat dg semangat integrasi keilmuan dg menambahkan semangat *entrepreneurship*;
- Paradigma keilmuannya masih tetap mengacu pd integrasi dan interkoneksi dan pd tahap ini mulai tampak distingsi integrasi keilmuan pd masing-masing UIN;
- Landasan Penyelenggaraan Pendidikan masih mengacu pd semangat integrasi keilmuan dan interkoneksi dg mengacu pd ayat-ayat *qauliyyah* dan *qur'aniyyah* sbg *grand narrative* yg mengarahkan dan sekaligus menjadi panduan etik pengembangan ilmu pengetahuan. Konsep pendidikan UIN diarahkan pd lulusan yg mjd ulama, intelektual, dan budayawan yg mampu menghadapi *high competence*, kinerja *excellence*, keragaman (pluralitas), revolusi informasi dan teknologi dan knowledge transfer. Konsep penyelenggaraan pendidikan menjadikan *Islamic entrepreneurship*.

PLATFORM PERIODE KETIGA

- Mewujudkan pendidikan tinggi Islam riset yang terdepan dengan berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban;
- Mewujudkan pendidikan tinggi yang unggul dan berakhlak;
- Mewujudkan pendidikan tinggi Islam yang kompetitif di Asean;
- Mengembangkan kajian Islam, sains teknologi, dan peradaban secara integrative;
- Mewujudkan pendidikan tinggi yang menjadi rujukan internasional dalam pengembangan ilmu keislaman;
- Mewujudkan pendidikan tinggi Islam yang inovatif dengan semangat entrepreneurship.

AREA OF CONCERNS OF EXISTING UIN

- Dit. Diktis mensyaratkan rencana memiliki distingsi sebagai standar keunggulan dan kekhasan setelah menjadi UIN;
- Pada tahun 2017 Kemenag melakukan moratorium transformasi IAIN menjadi UIN (Surat Dirjen Pendis Nomor 2534/Dj.I/PP.03.2/07/2017 tanggal 4 Juli 2017) dalam rangka melakukan evaluasi existing UIN dengan melakukan kajian ulang thd integrasi keilmuan, menyusun rencana pengembangan PTKIN dalam bentuk *grand desain* yang mencakup peta persebaran PTKIN, proyeksi PTKIN, dan rencana pengembangan PTKIN di masa yang akan datang.
- Tahun 2019 dibuka presentasi pengajuan UIN dan dari 9 ada 7 yang sudah menjadi UIN pada tahun 2021 dan bertambah 5 UIN pada tahun 2022. Jadi saat ini sudah ada ada 29 UIN di Indonesia dan beberapa yang lain sedang menunggu izin Prakarsa turun dari MenPANRB (IAIN Cirebon, IAIN Palopo...

ISSUES On CURRENT TRANSFORMATION

- Tahun 2021 ada 10 PTKIN adiknya 9 PTKIN yang akan divisitasi berdasarkan PMA yang baru.
- Belum ada ada Evaluasi yang mengukur tingkat ketercapaian UIN dalam mewujudkan distingsinya dan target-target yang dijanjikan ketika menjadi UIN. Jikapun telah dilakukan sangatlah terbatas dan belum merupakan kajian yang mendalam.
- Belum ada regulasi tentang pedoman untuk mengevaluasi keberhasilan UIN dalam mewujudkan distingsi dan target lainnya yang direncanakan ketika menjadi UIN sesuai proposal dan naskah akademik usulan perubahan bentuk mejadi UIN.

REKOMENDASI BAGI IAIN YANG SUDAH MENJADI UIN

- Merumuskan kembali grand desain dan rencana strategik UIN sesuai dengan janji yang dituangkan dalam proposal dan naskah akademik usulan transformasi menjadi UIN;
- Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur tingkat capaian UIN dalam mewujudkan distingsinya dan target lain yang telah ditetapkan.
- Menurut Anda bagaimana performa UIN yang sudah ada saat ini???

What Next After Organisational Transformation (UIN)?

- Creating a Learning Culture
- Datas Migration From Previous IAIN to present
- Strengthening Islamic Integration should be communicated with MonE and HE to get approval for secular study program
- Maintain "Islam Wasathiyah" within the Islamic Higher Education to avoid that transforming *into UIN is actually building home for others??*



The Importance of Learning Organization on Islamic Higher Educational Transformation : Area of Concerns and Future Direction

M. Adib Abdushomad, M.Ag, M. Ed., Ph. D
Head of Sub-Directorate on Institution and Cooperation
Diktis-MORA

Learning at the Organizational Level

- Organizational learning is. Or organizational learning is...
 - ✦ An organization *that learn though it peoples*
 - ✦ Five disciplines of Learning organisation that is... (Personal Mastery, etc.)
 - ✦ How vision, strategy, culture, leadership, structure, processes, communication, management practices, etc. come together to support & align learning with mission and goals
- To Support Organizational Learning, the Organization must...
 - Establish systems to capture and share learning
 - Empower people toward a collective vision



Creating Learning Organizations = Changing the Culture

Learning organizations have systems that:

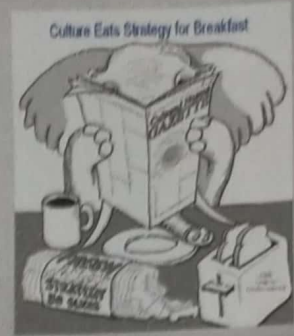
- Capture
 - Share
 - Use
- knowledge

Leaders must champion this.



Leadership For embedding a Learning Organisation

- Strengthening the core values of MORA through *Spiritual Leadership*
- Extensive use of informal learning strategies such as action learning, executive coaching
- Creating a Learning Culture (Spaciality)



Helping leaders create a learning culture

- A learning culture is one in which learning is a deliberate part of the organization's strategy
- Change is understood to be a learning process- and change is continuous
- Leaders model learning themselves, reward learning, and use mistakes as opportunities to learn

What is Islamic Integration for ?

Building Islamic Civilisation Through Education or :

- ✗ "Further strategy" to expand the captive market and ignore our core competency in Islamic Studies?
- ✗ Institutional outlook toward others (less confidence with the existing condition)
- ✗ Islamic Integration to build khoira ummah, as the ambassador.



Transforming into a University: Building "a house for others"??

- Some challenges
 - The input of the existing UIN indicates more general education continue to UIN with lack of Islamic Studies (Muallaf in Islamic Studies)
 - The vision of Islamic Integration has been challenged or "miss-interpreted" those who graduate from non-Islamic studies who become a lecture for Science Faculty?
 - The growing number of "Islamic textualism" approaches as the result of the input and outside HR
 - It could be happen that the transformation into UIN is actually make "home for others"...



**FOTO KEGIATAN SHARING KNOWLEDGE
JUM'AT, 02 SEPTEMBER 2022**

Achmad Tohir, S.HI., M.H.



Fifi Framelia Nofandika, S.Si





Ninik Wahyu Lestari, M.M.





PELATIHAN TEKNIS PELAYANAN PUBLIK

Malang, 25 – 29 Juli 2022

By :

1. Achmad Tohir, S.HI.
2. Fifi Framelia Nofandika, S.Si

Materi

1. Building Learning Commitment
 2. Peningkatan dan Penjaminan Mutu Diklat Administrasi
 3. Pengarahan Program
-
1. Konsep dan Kebijakan Pelayanan Publik
 2. Desain Pelayanan Publik
-
1. Implementasi dan Pengawasan Pelayanan
 2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
-
1. Indeks Kepuasan Masyarakat
-
1. Pembangunan Bidang Agama
 2. Pengembangan SDM
 3. Evaluasi Program

BUILDING LEARNING COMMITMENT

- o Perencanaan
- o Pemilihan perangkat kerja
- o Aturan/Kontribusi Bersama
- o Konsep 5 (Beriman, Salam, Sapa, Sapaan dan Santiaji)
- o 3 K (Komitmen, Kolaborasi, dan Keaktyasan)

PENINGKATAN DAN PENJAMINAN MUTU DIKLAT ADMINISTRASI

- o Standar penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- o Pelatihan yang bermutu harus sesuai dengan kebutuhan berbasis kompetensi, didukung oleh sarana dan prasarana sehingga mampu meningkatkan kompetensi serta memberikan nilai tambah.

PENGARAHAN PROGRAM

Tuntutan pada Fungsi pokok untuk tiga KSA (Knowledge, Skill, and Attitude) sehingga program pelatihan harus memenuhi kebijakan kurikulum

1. Pre Test
2. Materi + Tugas-tugas
3. Post Test

Konsep dan Kebijakan Pelayanan Publik

1. Unsur dalam pelayanan publik adalah penyelenggara pelayanan, penerima layanan, dan kepuasan penerima.
2. Bentuk-bentuk pelayanan adalah administrasi, barang, dan jasa.
3. Prinsip pelayanan prima meliputi responsif, membangun visi dan misi, menetapkan standart pelayanan, pelatihan/pengembangan SDM serta adanya reward.

Desain Pelayanan Publik

1. Kualifikasi jenis pelayanan, penyusunan standart layanan, dan inovasi pelayanan.

IMPLEMENTASI DAN PENGAWASAN PELAYANAN

1. Momen pada pelayanan publik adalah tahap take, watch, report, serta built, track, dan look optimasi.

PENGLOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

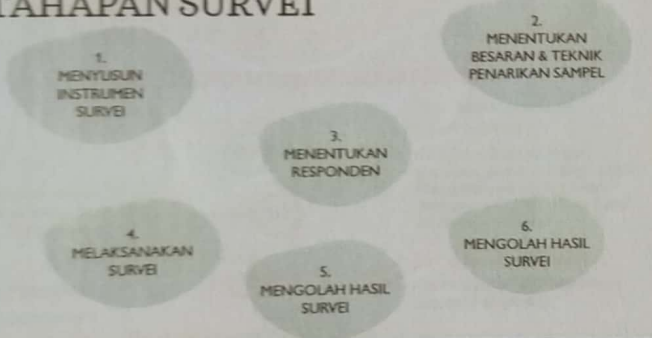
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- Diisi dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dan hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan realitasnya.

PRINSIP SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Transparan	• Hasil SKM dipublikasikan dan mudah diakses masyarakat
Partisipatif	• Partisipasi penuh masyarakat & pihak terkait dan kesempatan luas yang seluas-luasnya
Akuntabel	• Diskusi dengan pihak yang bertanggung jawab dan konsisten
Berkesinambungan	• SKM dilaksanakan secara berkala & secara teratur dan menggunakan pendekatan yang berkelanjutan
Keadilan	• Pelaksanaan SKM seluas-luasnya untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara merata, sesuai dan berkeadilan
Netralitas	• Survey tidak boleh memiliki kepentingan pribadi, golongan dan kelompok

TAHAPAN SURVEI



PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA

- Kementerian Agama selalu berkolaborasi dan berkoordinasi dalam pembangunan pelayanan kepada masyarakat

PENGEMBANGAN SDM

- Setiap SDM yang ada membutuhkan berbagai pelatihan/diklat yang sesuai dengan bidangnya dalam peningkatan kompetensi sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik

- Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pemerintah sangat memperhatikan masalah sumber daya manusia dengan baik
- Keunggulan SDM pemerintahan yang dilaksanakan dalam kegiatan pemerintah yang nyata harus bisa meningkatkan pelayanan publik dengan baik karena tidak hanya memperhatikan aspek pelayanan yang baik, tapi juga lingkungan

Thank You



PELAYANAN PRIMA

Pelayanan sebaik-baiknya yang menimbulkan kepuasan pada warga masyarakat. Pelayanan prima berorientasi pada pemenuhan harapan publik (*public expectation*) mengenai kualitas barang, jasa, dan pelayanan administrasi.

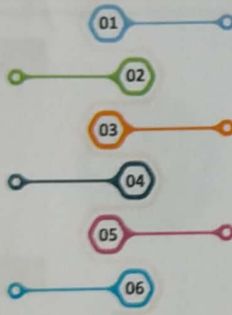


- ✓ Pemenuhan standar pelayanan. Ini wajib dilaksanakan dan dipampangkan pada tempat yang jelas terlihat oleh warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan;
- ✓ Pelayanan yang diberikan harus mengacu pada hukum sehingga memberikan kepastian hukum;
- ✓ Petugas yang memberikan pelayanan harus yang kompeten. Idealnya minimal memenuhi kompetensi akademis dan kompetensi teknis;
- ✓ Pelayanan yang diberikan harus cepat dan tepat serta sesuai dengan janji layanan.

MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA

Strategic Concept

Penyediaan layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat.



Top Management Commitment

Komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Manajemen tidak hanya dalam *financial performance* namun juga *service performance*

Services Standards

Penerapan dan Penyesuaian Standar Pelayanan.

Managing Productivity

Sumber Daya Manusia: Pengembangan Kompetensi, Penjaminan keamanan dan keselamatan kerja, fleksibilitas kerja.

Infrastruktur: Teknologi, Informasi, dan Komunikasi serta Sarana Prasarana

Satisfying both employees and customers

Memberikan perlindungan bagi internal pegawai. Tindaklanjut pengaduan masyarakat.

Monitoring Systems

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik

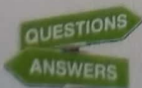
Strategi Peningkatan Pelayanan Prima

Kepatuhan terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

- Menerapkan Standar Pelayanan & Maklumat Pelayanan.
- Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, minimal 1 tahun sekali.
- Pengelolaan pengaduan masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan.
- Pengembangan Inovasi.
- Replikasi *Best Practice*.
- Perbaikan Berkelanjutan.

ANALISA KEBUTUHAN PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT

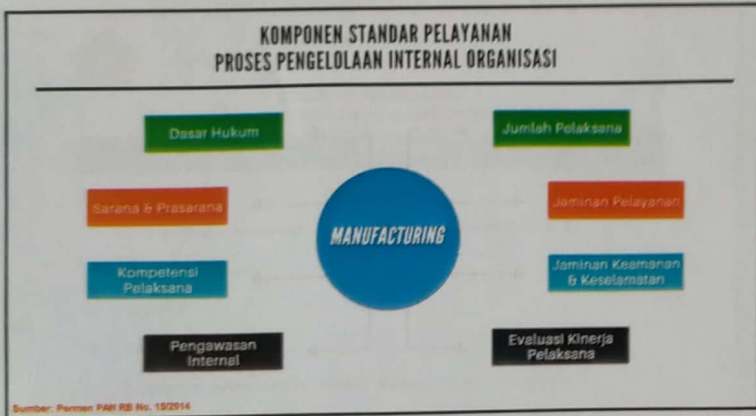
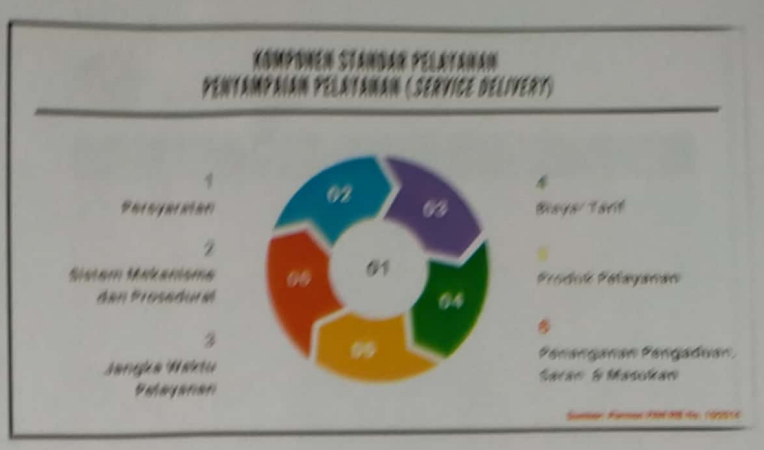
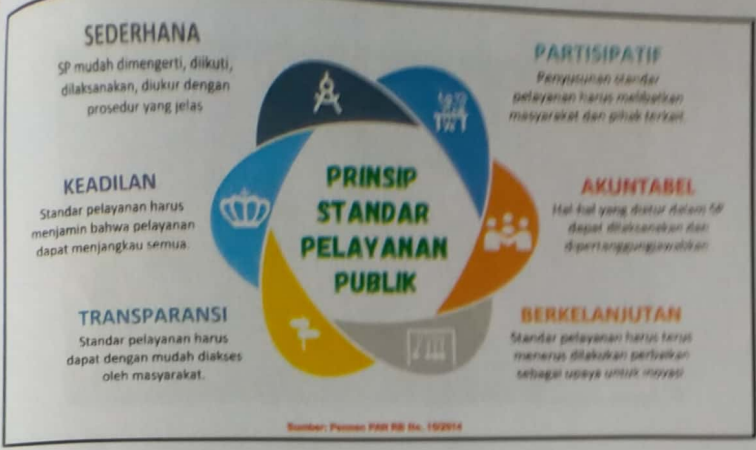
Proses untuk mengidentifikasi masalah dalam pelayanan guna menentukan tindakan atau solusi yang tepat dalam rangka memberikan kepuasan dan atau keuntungan kepada masyarakat dengan menggunakan alat atau metode yang efektif dan efisien.



TUJUAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN (SP)

- Memberikan kepastian pelaksanaan pelayanan publik;
- Meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan kemampuan penyelenggara pelayanan.





PERENCANAAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN (SP) DAN MAKLUMAT PELAYANAN (MP)

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Standar Pelayanan (SP) adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat mudah terjangkau dan teratur.

Sumber: Peraturan PAJ RI No. 15/2014



Tim Standar Pelayanan dibentuk oleh penyelenggara yang minimal terdiri dari:

1. Kepala satuan kerja penyelenggara pelayanan
2. Pelaksana yang bertanggung jawab pelayanan
3. Perwakilan pelanggan yang berhubungan dengan pengguna jasa pelayanan

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Keterangan

Pembentukan Tim

Anggota Tim

- UNSUR SKPD:
 1. PENGAMBIL KEPUTUSAN: KEPALA SKPD;
 2. FUNGSI TEKNIS: KABID/KASI PELAYANAN, FRONT LINER.
- UNSUR LAIN: BAGIAN ORGANISASI, PENGELOLA KEUANGAN, PENGAWAS/ INSPEKTORAT.

Tim diangkat melalui SK Kepala Daerah/ SKPD



KANIGARA

Contoh

DAFTAR JENIS PELAYANAN

Unit Kerja: _____

NO	JENIS PELAYANAN	PROSEDUR LAYANAN	DIKAS HUKUM PENYELENGGARAAN LAYANAN	MASYARAKAT PENGUNTA	PINAN TERKAIT
1					
2					
3					
4					
...					

Contoh



STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN _____

STANDAR PELAYANAN

(Diisi sesuai spesifikasi jenis pelayanan)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	(gambaran dalam bentuk flow chart)
3	Jangka Waktu Pelayanan	
4	Biaya/ Tarif	
5	Produk Layanan	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	(informasi cara penyampaian pengaduan)

Contoh



STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN _____

STANDAR PELAYANAN

(Diisi sesuai spesifikasi jenis pelayanan)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. ... 2. ...dit
2	Sarana dan Prasarana	1. ... 2. ...dit
3	Kompetensi Pelaksana	1. ... 2. ...dit
4	Pengawasan Internal	...
5	Jumlah pelaksana	...
6	Jaminan Pelayanan	...
7	Jaminan Keamanan dan Ketertarikan	...
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	...

UJI PUBLIK (PUBLIC HEARING) DRAFT SPP & MP

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan SPP guna menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

METODE UJI PUBLIK (PUBLIC HEARING) DRAFT SPP & MP



HAL-HAL YANG DIBAHAS TERKAIT UJI PUBLIK (PUBLIC HEARING)



Dukungan pendanaan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pelayanan.



Pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan dari segi kualitas maupun kuantitas.



Sarana, prasarana, dan atau fasilitas yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan.

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) & MAKLUMAT PELAYANAN (MP)

1. BERITA ACARA PEMBAHASAN SPP

Sebelum dilakukan penetapan SPP, penyelenggara wajib membuat berita acara, dan pihak-pihak yang terlibat wajib memberikan tanda tangannya pada berita acara.

2. MENYUSUN DAN MENETAPKAN MP

MP adalah pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan SP. MP juga berisi kesediaan untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan SPP.

Contoh

BERITA ACARA RESEPTUKATIB (LANSIAWA PUBLIK) (Tulis jenis pelayanan publik)
DI UNIT ORGANISASI (Tulis tempat penyelenggaraan pelayanan publik)

Nomor :
Tanggal :
Jam Pelayanan :
Standar Waktu Pelaksanaan :
Layanan : (Tulis jenis pelayanan publik yang diberikan)

Jenis Layanan	Keperluan	Layanan SOP	Waktu yang Diperlukan	Waktu Layanan	Biaya

SOSIALISASI SPP & MP)

Sosialisasi SPP & MP dilakukan untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi penyelenggara, masyarakat dan pihak terkait guna memastikan dan adanya jaminan penyelenggaraan pelayanan. Sosialisasi harus didokumentasikan oleh penyelenggara untuk keperluan administrasi.



Sharing Session Pelatihan Kearsipan

Oleh: Rochana Firmadhona, S.Pd., M.Pd

Latar Belakang Pengelolaan Arsip

- Jumlah Arsip produced (printed + digital)
- Arsip kertas, foto, video & juga hasil alihmedia, how to arrange?
- High demand of request access to user
- Pemeliharaan dan perawatan untuk "obsolete + damaged archives"
- Digital management (process digitization)



2

Identifikasi dan Penyiapan digitalisasi arsip

Penyiapan Digitalisasi Arsip Pra-Digitalisasi Arsip

- Identifikasi dan seleksi arsip/naskah
- Penyiapan arsip (termasuk restorasi, access review and screening/numbering, locating, pulling, and refiling)
- Recheck deskripsi dan metadata (kecukupan untuk penemuan Kembali dan layanan kepada user)

3

Penyiapan Digitalisasi Arsip

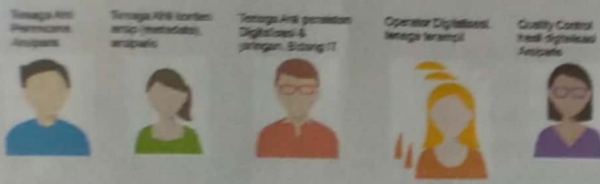
Penetapan Kebijakan

1. Menyusun Perencanaan kegiatan digitalisasi;
 - Mengidentifikasi Jumlah File digital yang akan tercipta;
 - Mengidentifikasi kebutuhan Storage;
 - Mengidentifikasi kebutuhan SDM;
 - Menentukan prioritas arsip yang akan didigitalisasi; dan
 - Membuat dokumen Manajemen Proyek, yang berisi kegiatan dan target yang hendak dicapai beserta penanggungjawabnya dalam kerangka waktu yang jelas dan terukur;
2. Menetapkan tim pelaksana digitalisasi;
3. Menyiapkan daftar arsip yang akan didigitalisasi; dan
4. Menyiapkan metadata arsip yang akan didigitalisasi

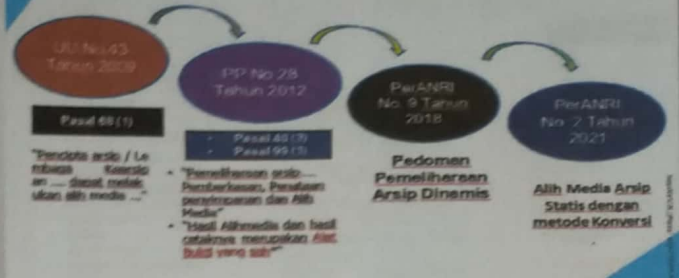
4

Penyiapan Digitalisasi Arsip

SDM Pelaksana Digitalisasi



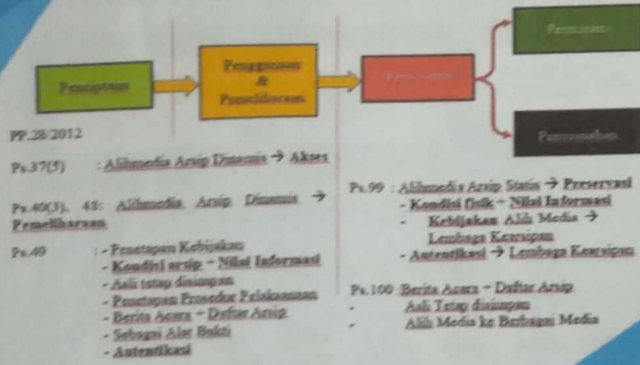
Kebijakan/ Dasar Hukum AlihMedia



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN
ASPEK NASIONAL, FORMAL, INFORMAL

12

Alih Media dalam Daur Hidup Arsip



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN
ASPEK NASIONAL, FORMAL, INFORMAL

TUJUAN ALIH MEDIA ARSIP

Kepentingan Pelestarian dan Pelayanan Arsip

ASPEK LEGALISASI ALIH MEDIA

01. Alih Media dilakukan untuk pelaksanaan Pelestarian Arsip Statis melalui Reproduksi (Pasal 99 ayat (1)).
02. Alih Media dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi fisik dan nilai informasi yang masih dimiliki Arsip Statis dalam bentuk dan media elektronik daripada media lainnya sesuai dengan Aduanya (Pasal 99 ayat (2) dan Pasal 100 ayat (1)).
03. Arsip yang di Alihmediakan tetap disimpan untuk kepentingan Pelestarian dan pelayanan arsip (Pasal 100 ayat (2)).

Kat. B. Rongga & Pustaka Arsip Baru, Paal 26 dan Paal 100 (1) dan (2) 10, 2011, 2011



APAKAH DIGITALISASI?

Proses konversi dari media/informasi yang tercetak, ditulis dan/atau digambar ke dalam bentuk atau format digital.

Prinsip Digital

01010101110001



Peningkatan Akses

- Akses sebagai bahan penelitian
- Pembatasan akses, poin dan tempat berbeda
- Implementasi Kolaborasi Virtual
- Mendukung penyediaan kopulisan
- Memperluas ketersediaan bahan untuk mendukung pendidikan



Fasilitas Format Baru dan Peningkatannya

- Tidak dapat dilihat dalam bentuk aslinya
- Kerusakan media karena memori teknologi
- Peningkatan Produktivitas (misal OCR OCR (Optical Character Recognition) or text wording for converted texts)



Preservasi

- Penyelamatan Informasi
- Keabsahan Akses
- Back-up

TUJUAN DIGITALISASI



Agar arsip atau rekaman informasi dapat diakses melalui sistem komputer (online, offline, kapanpun dan dimanapun)

Salah satu strategi preservasi arsip masa kini, agar dapat selalu mengikuti perkembangan teknologi

Agar arsip dapat dipertahankan dan dijaga di lokal repository atau cloud storage

Kenapa harus segera digital?

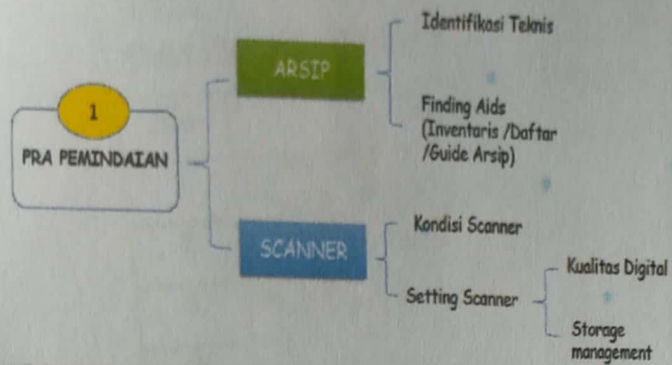
1. Penyelamatan arsip dalam berbagai media
2. Arsip terancam tidak bisa dibuka (obsolete)
3. Arsip terancam rusak



Prosedur Digitalisasi Arsip Dinamis



Prosedur Digitalisasi Arsip Statis



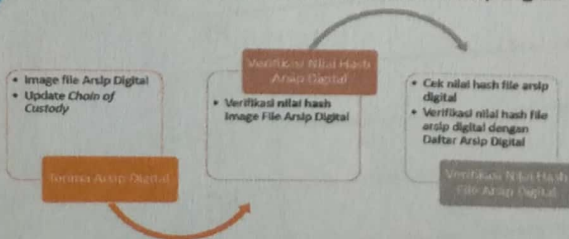
Autentikasi

Merupakan proses pemberian tanda dan/atau pernyataan tertulis atau tanda lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang menunjukkan bahwa arsip yang diautentikasi adalah asli atau sesuai dengan aslinya (Perka ANRI No.20 Tahun 2011)

Kepala lembaga kearsipan menetapkan autentisitas arsip statis maupun arsip hasil alih media dengan membuat surat pernyataan berdasarkan persyaratan:

- pembuktian autentisitas didukung peralatan dan teknologi yang memadai;
- pendapat tenaga ahli atau pihak tertentu yang mempunyai kemampuan dan kompetensi di bidangnya; dan
- pengujian terhadap isi, struktur, dan konteks arsip statis. (PP 28 Tahun 2012, Pasal 107)

Cara Memastikan Autentisitas dan Validitas Arsip Digital



Penutup

- o Suatu dokumen/arsip elektronik (hasil digitalisasi) dapat memenuhi syarat autentik dan terpercaya jika dilakukan dengan membangun infrastruktur penyimpanan (repository) yang aman didukung oleh layanan terpercaya (trustservice).
- o Autentisitas harus didukung bukti yang kuat, yakni teknologi yang handal serta prosedur administrasi yang handal.



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

DAFTAR HADIR

KEGIATAN

HARI/TGL/BLN/TAHUN

JAM

BAGIAN/TEMPAT

Sharing Alat Pelayan Publik
 Jumat 12/9/2022
 10.00
 Ruang Meeting Fakultas Syariah

No	Nama	Bagian/Jabatan	Instansi	Tanda Tangan	
1	Sudirman			1	
2	Sulungat			2	
3	Ninik			3	
4	Rochma F.			4	
5	Fyri Fransia			5	
6	Mardiana			6	
7	Toluk			7	
8	A. Zubair.			8	
9	Muttahidul			9	
10	Hidayat			10	
11				11	
12				12	
13				13	
14				14	
15				15	
16				16	
17				17	
18				18	
19				19	
20				20	
21				21	
22				22	
23				23	
24				24	
25				25	
26				26	
27				27	